PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Sabtu Tanggal: 01 Juli 2017 Halaman: 1

KMS Tak Laku

Siswa Miskin Tetap Dibantu

JOGJA, BERNAS - Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang dimiliki keluarga tak mampu di Kota Yogyakarta tak bisa lagi difungsikan untuk kemudahan pembiayaan anak didik yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Hal itu seiring beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas di oleh Pemda DIY.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, Jumat (20/6) kemarin, mengungkapkan para pemegang KMS yang saat ini ingin ingin mendaftarkan anaknya ke jenjang SMA/SMK harus kembali mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kantor Dinsos Kota Yogyakarta.

"Warga yang hendak mencari SKTM cukup menunjukkan KMS karena secara fungsi sebenarnya tidak ada berbeda," kata Hadi Muhtar.

Hadi menjelaskan, dari sisi fungsi, antara KMS dengan SKTM sebetulnya tidak berbeda. Sehingga, warga yang hendak mencari SKTM cukup menunjukkan KMS yang dimiliki. "Kalau memang tidak bisa menggunakan KMS dan harus SKTM, kami tetap melayani warga," katanya.

Hadi mengakui, menjelang libur lebaran kemarin terjadi antrean calon peserta didik baru yang hendak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Diprediksi dalam pekan depan kondisinya masih akan sama. Sehingga, jika tahun lalu antrean pendataan siswa KMS menumpuk.

▶ ke hal 7

Siswa Miskin

Sambungan dari hal 1

"Sudah ratusan orang lebih yang mengurus," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, mengaku sudah tidak memiliki kewenangan pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK. Namun demikian, siswa miskin di Kota Yogyakarta yang melanjutkan ke jenjang tersebut tetap akan dibantu oleh Pemkot untuk biaya personal maupun operasional sekolah.

"Besarannya jenjang SMA ialah Rp 4 juta pertahun, dan SMK Rp 4,5 juta pertahun," katanya.

Salah seorang orang tua yang mendaftar SKTM, Haryono, mengaku tidak tahu jika KMS akhirnya tidak diberlaku lagi dalam proses pendaftaran ke jenjang SMA sejak dikelola oleh Pemprof DIY. Namun demikian, lantaran menjadi persyaratan, ia harus rela repot kesana kemari agar putranya bisa segera mendaftar jenjang SMA. "Aturannya kok berubah-ubah, jadi ribet," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M Ali Fahmi, mengatakan hak warga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan sekolah tidak hilang. Maka itu ia meminta warga tetap mengurus sesuai ketentuan yang berlaku, karena memang saat ini terjadi peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. "Tapi warga Kota yang tidak mampu tidak kehilangan haknya, hanya mungkin perlu penyesuaian dengan aturan baru," ujarnya. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005